

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kabupaten Gresik

Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik



dpmptsp_gresikkab



DPMPTSP Kab Gresik



dpmptsp.gresikkab.go.id



DPMPTSP GRESIK

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gresik, 23 AUG 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



A.M REZA PAHLEVI, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	44
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
	3.3 Program dan Kegiatan	67
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah	75
BAB V	: PENUTUP	77
LAMPIRAN	: MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota	2
Tabel 2	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	7
Tabel 3	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Guna Pencapaian Sasaran	8
Tabel 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021	10
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik	21
Tabel 6	Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik	22
Tabel 7	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022	22
Tabel 8	Penerbitan Izin Tahun 2023	25
Tabel 9	Pemetaan Permasalahan	30
Tabel 10	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025	41
Tabel 11	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Gresik	52
Tabel 12	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	57
Tabel 13	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	60
Tabel 14	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPM PTSP Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	62
Tabel 15	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	68

BAB I

PENDAHULUAN

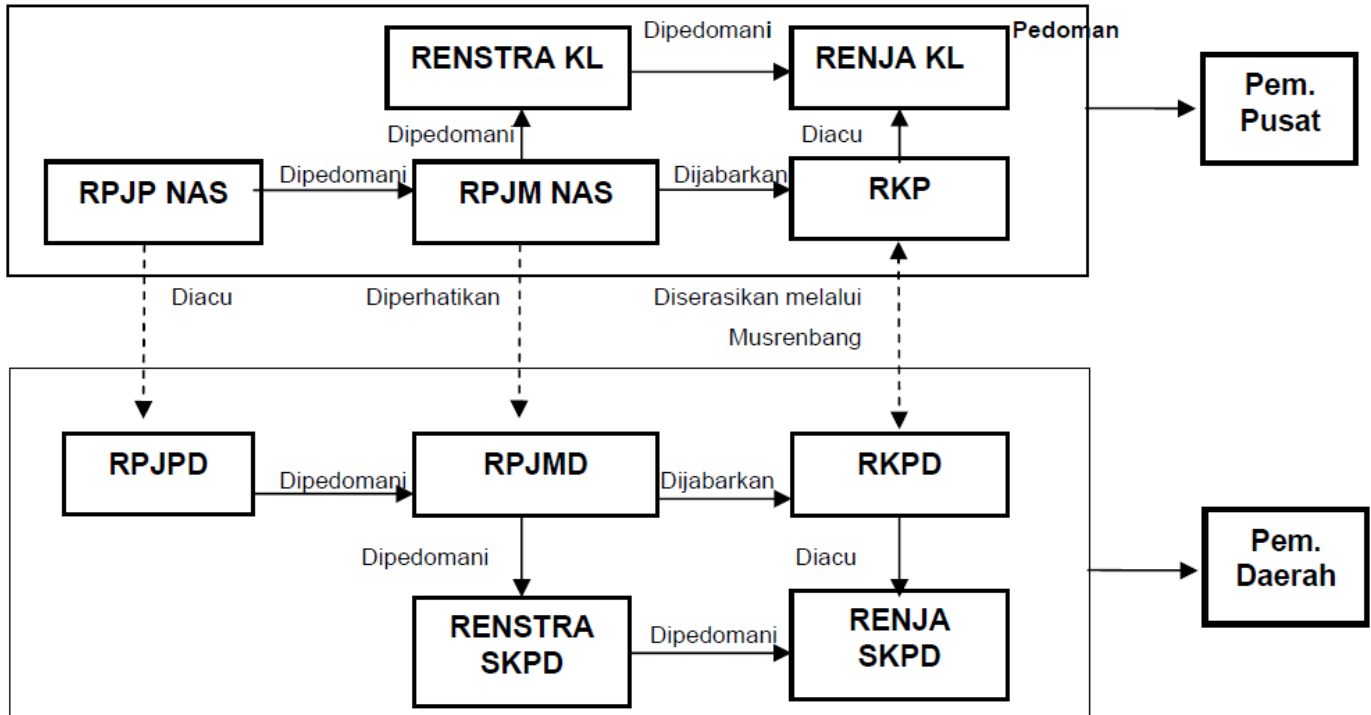
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain, Rencana Kerja DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan forum OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Renja DPMPTSP dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota:

**KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L
DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**
(Tabel 1)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 050/30/437.74/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor : 050/01/437.74/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2024.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2024 dan DPA OPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
 - 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
 - 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
2. Pada Bab II berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Pada Bab III berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.
4. Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
5. Bab V berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023. Pencapaian kinerja terhadap program/kegiatan/subkegiatan dan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan dan Belanja

Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 10.010.688.133,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.979.111.733,00,- dan Belanja Modal Rp. 31.576.400,00,- sedangkan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.609.498.702,51,- (96,30%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 31.274.400,00,- (99,04%) dari rencana. Dengan demikian, jika realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.35.992.185.808,78,- maka terjadi surplus sebesar Rp. 26.351.412.706,27,- (lihat pada tabel berikut ini) :

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Tabel 2)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	PENDAPATAN	185.000.000.000,00	35.992.185.808,78	19,46	57.269.497.375,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.000.000.000,00	35.992.185.808,78	19,46	57.269.497.375,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	185.000.000.000,00	34.853.263.998,00	18,84	57.063.234.756,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	0,00	1.138.921.810,78	0,00	206.262.619,00
2.	BELANJA	10.010.688.133,00	9.640.773.102,51	96,30	12.610.338.072,51
2.1	BELANJA OPERASI	9.979.111.733,00	9.609.498.702,51	96,30	12.607.558.072,51

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2.1.1.	Belanja Pegawai	7.101.305.000,00	6.799.930.890,51	95,47	7.058.519.504,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.877.806.733,00	2.829.567.812,00	98,32	5.549.038.568,51
2.2	BELANJA MODAL	31.576.400,00	31.274.400,000	99,04	2.780.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	3.048.000,00	92,36	2.780.000,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.276.400,00	28.226.400,00	99,82	0,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	10.010.688.133,00	9.640.773.102,51	96,30	12.610.338.072,51
	SURPLUS/(DEFISIT)	174.989.311.867,00	26.351.412.706,27	15,06	44.659.159.302,49

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp.928.931.850,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Guna Pencapaian Sasaran (Tabel 3)

No	Sasaran	Target Keuangan 2023	Realisasi 2023		Ket
			(Rp)	%	
1	Meningkatnya angka investasi	621.699.500,00	620.470.800,00	99,80	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	307.232.350,00	304.326.130,00	99,05	
	TOTAL	928.931.850,00	924.796.930,00	99,55	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) subkegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah sebesar 99,55 %.

Sedangkan untuk program kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar

Rp. 9.081.756.283,00 (termasuk gaji dan tunjangan) dan teralisasi sebesar Rp. 8.715.976.172,51 atau 95,97 %.

2.1.2 Realisasi kinerja program/kegiatan/subkegiatan tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	90%	100%	111,11%	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100,00	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	1 paket	100,00	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83 orang	83 orang	100,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100,00	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	100,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5 dokumen	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	100,00	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	3 jasa	100,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	6 jenis	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	100,00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	-	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13 unit	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 jenis	5 jenis	100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	23,43%	258,51%	1103,33%	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	2 draft	100,00	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 kegiatan usaha	9 kegiatan usaha	100,00	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/kajian	2 draft/kajian	100,00	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 kajian	1 kajian	100,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	4,09%	17,65%	431,47%	
Penyelenggaraan	Jumlah jenis promosi	2 jenis	2 jenis	100,00	

Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	penanaman modal				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	94,27%	125,70%	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan	4715 pelayanan	68050 pelayanan	1,443,26%	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 pelaku usaha	62334 pelaku usaha	6.233,4%	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	1500 izin	1819 izin	121,26%	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 orang	26 orang	104,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40 kegiatan usaha	94 kegiatan usaha	235,00%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	68,42%	228,07%	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pementuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	120 kali	78,94%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 kegiatan usaha	23 kegiatan usaha	92,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	450 pelaku usaha	470 pelaku usaha	104,44%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	125 kegiatan usaha	86 kegiatan usaha	68,80%	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	4	80,00%	
Pengelolaan Data dan	Jumlah jenis pengelolaan data	3 jenis	3 jenis	100,00	

Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan informasi				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	2 dokumen	100,00	

Dari tabel diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari 6 program yang ada, 5 program capaiannya diatas 100% dikarenakan beberapa hal antara lain :
 - Tingginya nilai investasi di Kabupaten Gresik yang disebabkan banyaknya investor yang masuk
 - Dengan adanya sistem online (OSS RBA) dan SICANTIK membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha dapat memproses izinnya sendiri secara online. Sehingga izin yang diterbitkan melalui sistem OSS pun menjadi banyak
 - Tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan realisasi investasinya semakin tinggi dari tahun ke tahun
2. Untuk program yang capaiannya dibawah 100%, yaitu Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja tingkat kematangan layanan penanaman modal, dari target indeks 5 hanya terealisasi 4 dikarenakan belum dilakukannya audit TIK pada penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Gresik
3. Untuk capaian kegiatan, dari 12 kegiatan terdapat 2 kegiatan yang capaiannya diatas dan dibawah antara lain :
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota capaiannya sebesar 6.233,4%. Hal ini sama seperti alasan diatas, dimana dengan adanya sistem izin online OSS RBA dan

SICANTIK membuat perizinan semakin mudah dan dapat diproses sendiri oleh pelaku usaha sehingga jumlah penerbitan izin meningkat

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota capaiannya hanya 78,94% dikarenakan terdapat refocussing anggaran

4. Untuk capaian subkegiatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah alasannya sama dengan alasan program/kegiatan diatas. Untuk subkegiatan yang Pemeliharaan Mebel yang capaiannya 0% dikarenakan anggaran didrop/direfocussing.
5. Dengan refocussing anggaran yang dilakukan mulai tahun 2023 menyebabkan target kinerja yang ada pada Renstra tidak dapat tercapai. Untuk itu diperlukan revisi Renstra kembali untuk menyesuaikan target. Hal ini dikarenakan kebanyakan program/kegiatan/subkegiatan yang tidak tercapai di tahun 2023 kebanyakan dikarenakan refocussing anggaran

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPSTSP s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2024 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	98%	100%	90%	100%	111,11	95%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	18 jenis dokumen	9 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100	3 jenis dokumen	15 jenis dokumen	83,33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	62,50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 jenis dokumen	3 jenis dokumen	-	-	-	-	3 jenis dokumen	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	8 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	4 laporan	50,00%

					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	8 dokumen	66,67 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP	72 bulan	24 bulan	-	-	-	-	24 bulan	100%
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	211 orang/ bulan	-	51 orang/ bulan	51 orang/ bulan	100	52 orang/ bulan	103 orang/ bulan	48,81%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	6 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	100%
					Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	50,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	4 paket	66,67 %
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6 paket	2 paket	-	-	-	-	2 paket	100%
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	332 orang	-	83 orang	83 orang	100	83 orang	166 orang	50,00%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	37 sub kegiatan	13 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100	6 sub kegiatan	25 sub kegiatan	67,57%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	900 buah	300 buah	-	-	-	-	300 buah	100%

					bangunan gedung								
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	-	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	50,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	108 item	108 item	-	-	-	-	108 item	100%
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	-	10 paket	10 paket	100	10 paket	20 paket	50,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6 jenis	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	100%
					Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100	3 paket	6 paket	50,00%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan	24 jenis	24 jenis	-	-	-	-	24 jenis	100%
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	-	2 paket	2 paket	100	2 paket	4 paket	50,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	10 jenis	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	100%
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	10 dokumen	50,00%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	130 kali	130 kali	-	-	-	-	130 kali	100%
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260 laporan	-	65 laporan	65 laporan	100	65 laporan	130 laporan	50,00%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33,34%

				SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	18 jasa	6 jasa	3 jasa	3 jasa	100	3 jasa	12 jasa	66,67%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	260 kali	260 kali	-	-	-	-	260 kali	100%
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	50,00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 bulan	24 bulan	-	-	-	-	24 bulan	100%
					Umlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	50,00%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	64 jenis	64 jenis	-	-	-	-	64 jenis	100%
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	50,00%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	36 jenis	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	24 jenis	66,67%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2 kendaraan	2 kendaraan	-	-	-	-	2 kendaraan	100%
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	50,00%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau	26 kendaraan	26 kendaraan	-	-	-	-	26 kendaraan	100%

				Operasional atau Lapangan	lapangan								
					Jumalh kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	52 unit	-	13 unit	13 unit	100	13 unit	26 unit	50,00%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	10 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	50,00%
					Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	-	5 unit	-	-	5 unit	10 unit	50,00%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 jenis	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100	-	12 jenis	100%
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 unit	-	6 unit	6 unit	100	6 unit	12 unit	50,00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	26 jenis	26 jenis	13 jenis	13 jenis	100	-	13 jenis	100%
					Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	52 unit	-	13 unit	13 unit	100	13 unit	26 unit	50,00%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	5 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	50,00%
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	-	5 jenis	50,00%
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 unit	-	-	-	-	3 unit	3 unit	25,00%

				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	163.98%	23,43%	15,62%	234,93%	1002,69%	39,04%	-	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12 draft	4 draft	2 draft	2 draft	100	2 draft	8 draft	66,67%
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 draft	2 draft	-	-	-	-	2 draft	100%
					Jumlah peraturan daerah/ provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50,00%
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 hasil evaluasi	2 hasil evaluasi	-	-	-	-	2 hasil evaluasi	100%
					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daera	2 kegiatan usaha	-	2 kegiatan usaha	9 kegiatan usaha	450	-	9 kegiatan usaha	450,00%
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12 draft/kajian	4 draft/ kajian	2 draft/ kajian	2 draft/ kajian	100	2 draft/ kajian	8 draft/ kajian	66,67%
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	2 draft	2 draft	-	-	-	-	2 draft	100%

					Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50,00%
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	-	-	-	-	1 daerah	1 daerah	100%
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen		
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik	2 kajian	2 kajian	-	-	-	-	2 kajian	100%
					Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten /kota	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	2 dokumen	50,00%
				Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	24.27 %	70,00%	4,09%	17,65%	431,47%	14,00%	70,00%	288,42%
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	12 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	8 jenis	66,67%
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	1 video, 1 kajian strategi	1 video, 1 kajian strategi	-	-	-		1 video, 1 kajian strategi	100%
					Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	2 dokumen	50,00%
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi investasi	4 kali	-	-	-	-		4 kali	100%
					Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	16 dokumen	-	4 dokumen	2 dokumen	50	4 dokumen	8 dokumen	50,00%
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	117,55%	75%	94,27%	125,70%	75%	117,55%	156,73%

				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan	29.298 pelayanan	41.587 pelayanan	4715 pelayanan	68050 pelayanan	1443	4715 pelayanan	46.302 pelayanan	158,04%
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/perse tujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	2.865 izin	36.416 izin	-	-	-		36.416 izin	1.271,06%
					Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	6060 pelaku usaha	-	1000 pelaku usaha	62334 pelaku usaha	6233	1515 pelaku usaha	62334 pelaku usaha	1.028,61%
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	5.050 izin	3146 izin	1500 izin	1819 izin	121,27	-	3146 izin	62,29%
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	148 kali	17 kali	-	-	-		17 kali	11,49%
					Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	25 orang	-	25 orang	26 orang	104,00	-	26 orang	104,00%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	80 kali	12 kali	-	-	-		12 kali	15,00%
					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi	40 kegiatan usaha	94 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	94 kegiatan usaha	235,00	-	-	-

					penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah								
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 dokumen	-	-	-	-	40 dokumen	40 dokumen	33,34%
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 pelaku usaha	-	-	-	-	1000 pelaku usaha	1000 pelaku usaha	33,34%
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 pelaku usaha	-	-	-	-	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	33,34%
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	75 kegiatan usaha	-	-	-	-	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	33,34%
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	53,42%	30,00%	68,42%	228,07%	30%	53,42%	178,06%
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan	1.037 kali	456 kali	152 kali	179 kali	117,76	152 kali	456 kali	43,97%

					pengawasan pelaksanaan penanaman modal								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	179 kali	105 kali	-	-	-	-	-	-
					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	25 kegiatan usaha	-	25 kegiatan usaha	23 kegiatan usaha	92,00	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	22 kali	25 kali	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	450 pelaku usaha	-	450 pelaku usaha	470 pelaku usaha	104,44	-		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	228 kali	276 kali	-	-	-	-	-	-
					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	125 kegiatan usaha	-	125 kegiatan usaha	86 kegiatan usaha	68,80	-	-	-
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 kegiatan usaha	-	-	-	-	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	33,34%
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	1350 pelaku usaha	-	-	-	-	450 pelaku usaha	450 pelaku usaha	33,34%

					Berbasis Risiko									
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	375 kegiatan usaha	-	-	-	-	125 kegiatan usaha	125 kegiatan usaha	33,34%	
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	4	5	4	80,00%	5	5	100,00%
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	18 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis	33,34%
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemanfaat sistem informasi	7.800 pengunjung	93.405 pengunjung	-	-	-	-	-	-
					Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	33,34%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024 (s.d tw 2)	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan realisasi investasi	-	-	5,00%	8,50%	12,00%	15,00%	31,70%	12,37%	35,00 %	40,00 %	-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (88,49)	SANGA T BAIK (88,58)	SANGAT BAIK (88,61)	SANGA T BAIK (89,62)	SANGAT BAIK (89,60)	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama investasi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan penanaman modal yang diarahkan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi. Penilaian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2023 dapat dilihat dari peningkatan realisasi investasi yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 131,48% dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 pertumbuhan realisasi investasi sebesar 24,11%. Pertumbuhan investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sehingga Kabupaten Gresik menjadi daerah tujuan penanaman modal. Realisasi investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016-2023 seperti tampak pada tabel data berikut:

Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMA (US\$ Ribu)	348.001	471.921,10	331.520,10	98.346,60	141.702,60	581.652,90	1.730.695,90	2.071.274,30
PMDN (Rp.Juta)	3.982.980,6	9.165.860,60	6.724.595,30	3.199.328,50	14.411.137,40	8.271.422,70	6.751.577,80	6.685.921,80
RPJMD								
	2016	2017	2018	2019	2020			
TARGET	27,45	31,45	35,45	39,45	43,45	-	-	
REALISASI	25,73	42,34	48,34	52,93	69,45	-	-	
CAPAIAN	93,73%	134,63%	136,36%	134,17%	159,84			

Tabel 2.7
Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,98 %	11,05%	370,81%
2022	2,89%	24,11%	834,26 %
2023	5,00%	31,70%	634,00%

Di tengah ekonomi yang masih mengalami pasang surut di tahun 2017, sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami kenaikan mencapai 11,70% di tahun 2017 atau sebesar Rp. 4.449.254.700.000,00 (empat trilyun empat ratus empat puluh

sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Senada dengan sektor penanaman modal dalam negeri yang mengalami pertumbuhan, investor asingpun masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap investasi di Kabupaten Gresik. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya realisasi investasi asing dari US\$ 348.001.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta seribu US dollar) di tahun 2016 menjadi US\$ 436.663.700 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor investasi dalam negeri di Kabupaten Gresik justru *survive* di tengah-tengah carut marutnya perlambatan ekonomi yang dirasakan secara nasional.

Di tahun 2018 dan 2019 di tengah perekonomian yang sepenuhnya belum membaik, investasi masih mengalami sedikit peningkatan seperti tampak dalam tabel diatas. Namun di tahun 2019 rencana investasi baik PMDN maupun PMA tidak dapat disajikan karena adanya perubahan sistem aplikasi dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) menjadi aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berbeda di tahun sebelumnya, di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 capaian investasi naik signifikan sebesar 159,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik tidak terpengaruh atau terimbas signifikan oleh dampak wabah tersebut. Perkembangan investasi domestik justru menunjukkan kontribusi meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya dengan selisih 11.211.406,4 (dalam juta rupiah) atau bertumbuh sebesar 350,39%. Sedangkan investasi di sektor mancanegara juga mengalami selisih positif sebesar 173.115,9 (dalam ribu US\$) atau bertumbuh sebesar 176,02%. Kondisi peningkatan investasi ini tidak luput dari peran seluruh stakeholders yang terkait dengan kondusivitas iklim

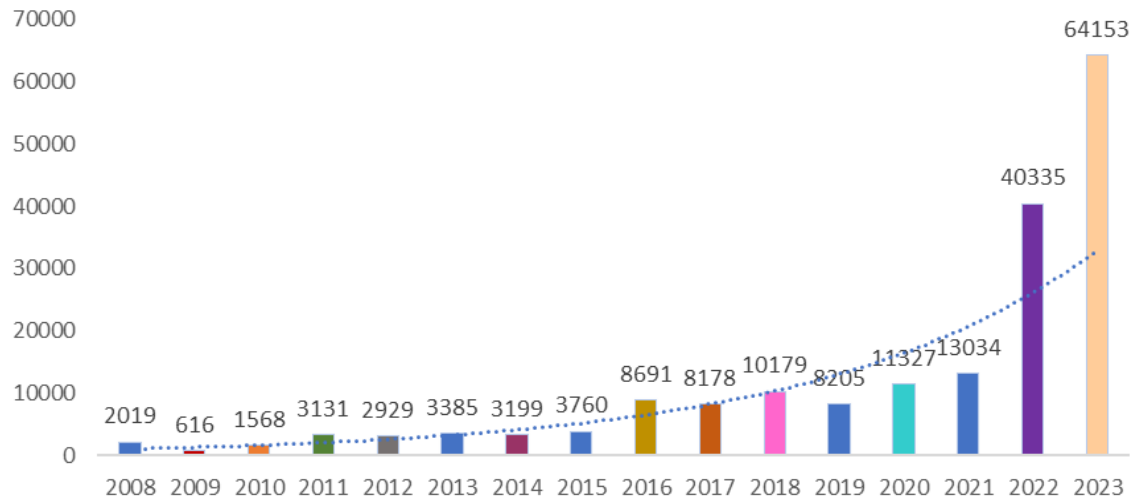
investasi yang didukung oleh peran pemerintah, legislatif, masyarakat dan tentunya dunia usaha serta asosiasi yang ada. Hal ini berlangsung sampai tahun 2023 ini Dimana pandemi COVID-19 juga telah berakhir. Investasi semakin meningkat terutama dengan adanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) JIPE.

Untuk tahun 2021-2026 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang pertama yaitu “Meningkatnya angka investasi” berubah indikatornya menjadi “ **Pertumbuhan realisasi investasi**”. Dimana sesuai dengan tabel 2.7 pertumbuhan realisasi investasi mengalami kenaikan 118,19 % dari tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya mulai bangkitnya ekonomi pasca pandemi COVID – 19 yang membuat investor mulai menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik seperti PT. Freeport Indonesia.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2008 sampai akhir 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melayani *customer* sebanyak 184.709 (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan) pemohon izin, sesuai data penerbitan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana grafik terlampir.

Gambar 2.1
Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2008-2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Bisa diasumsikan bahwa sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berdiri di tahun 2007, maka selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir, apabila diasumsikan dalam satu tahun ada kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) berkas. Berikut disampaikan tabel penerbitan izin selama tahun 2023

Tabel
Penerbitan Izin Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
I		NON OSS												
	A Site Plan	3	5	3	4	5	7	2	3	3	7	4	15	61
	B PBG	2	2	15	10	5	5	10	65	28	25	65	24	256
	C IMB	22	28	13	4	8	11	9	18	5	16	27	195	356
	D SLF	4	9	15	12	6	4	6	37	42	29	13	31	208
	E Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR)	14	2	27	10	29	0	25	24	28	36	27	94	316

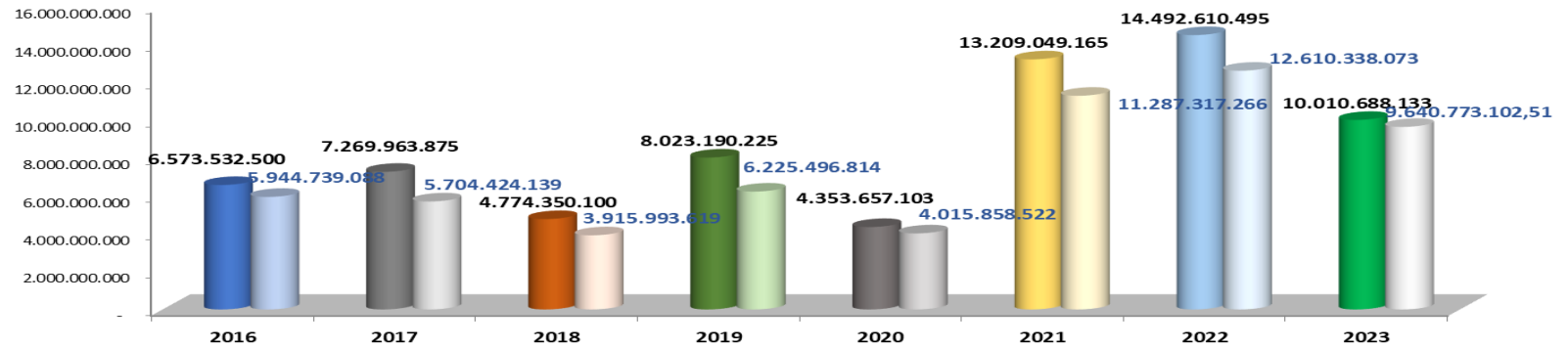
No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
	F Data SKKLH Non Pemerintah	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	5
	G Data PKPLH Khusus Pemerintah	0	1	0	1	0	0	1	0	7	0	0	0	10
	H Data PKPLH Khusus Non Pemerintah	12	5	0	6	0	1	2	5	1	1	2	4	39
	I SIM Pasar	0	51	25	23	0	30	9	32	7	37	39	32	285
	J Izin Pendirian SMP	0	1	1	9	0	0	1	0	0	1	2	1	16
	K Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	0	0	0	2	1	3	0	2	1	3	0	1	13
	L Izin Pendirian Satuan PAUD	0	8	9	0	3	7	3	0	1	3	9	2	45
	M Data Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	N Izin Reklame Insidentil	0	5	5	2	4	1	1	2	3	3	2	2	30
	O Reklame Tetap	0	0	27	30	13	27	11	68	40	61	41	54	372
	P Reklame Permanen	0	0	4	1	20	3	12	16	4	68	16	22	166
II		OSS												
	A NIB	2062	1557	2191	1726	2156	3382	3342	2128	2551	1655	1800	5146	29696
	B Izin	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	2	0	9
	C Persyarat Dasar	2240	1799	2392	973	2230	3519	3560	2268	2215	2215	2044	1540	26995
	D Umku	469	128	108	37	75	95	79	64	92	94	31	56	1328
	E Sertifikat Standar	56	384	422	198	333	449	420	324	394	394	335	235	3944
	Jumlah	4885	3985	5257	3049	4889	7545	7494	5062	5423	4649	4459	7456	64153

Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik membutuhkan

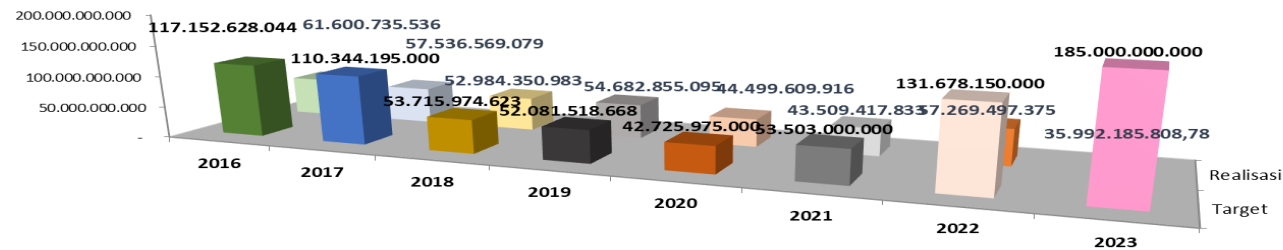
sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Telah disebutkan di awal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi. Capaian kinerja dengan fungsi pelayanan telah diuraikan di atas. Sedangkan fungsi pembangunan yang terkait dengan kegiatan operasional dengan alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan dalam dua grafik yaitu grafik target dan realisasi belanja dan grafik target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama kurun waktu lima tahun atau periode 2016-2023 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Gambar 2.3
Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Dari grafik APBD tahun 2016-2023 dapat dilihat bahwa anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mengalami naik turun seperti pada tahun 2020 mengalami penurunan target belanja sebesar Rp. 3.669.533.122,- dikarenakan adanya pandemi COVID 19 sehingga anggaran mengalami refocussing karena dialihkan untuk penanganan COVID 19. Di tahun 2021 sampai 2023 APBD mengalami kenaikan dikarenakan anggaran gaji dan tunjangan ikut dalam belanja kegiatan.

Berbeda dari target belanja yang mengalami naik turun mengikuti kondisi ekonomi dan negara, pencapaian PAD mulai tahun 2016-2022 mengalami kestabilan walaupun target yang ditentukan juga mengalami naik turun selaras dengan target belanja. Namun di tahun 2023 perolehan pendapatan mengalami penurunan sebesar 37,15% dikarenakan pemberlakuan PBG, dimana dengan PBG pendapatan mengalami penurunan sebesar 40-60% dibandingkan dengan IMB.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa identifikasi permasalahan-permasalahan di bidang penanaman modal dan perizinan diantaranya sebagai berikut :

Tabel.
Pemetaan Permasalahan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlambatan/penurunan realisasi penanaman modal akibat pandemi COVID-19 dan realisasi penanaman modal belum terlalu efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB)	Proses pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan tata ruang (PKKPR) belum dapat dilaksanakan secara maksimal	Adanya transisi Sistem OSS 1.1 kedalam OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan penggunaannya yang belum maksimal dikarenakan masih terkendala sistem dari pusat
	Belum terkoneksi OSS RBA dengan beberapa sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain seperti sistem KPP dari BPN	
	Belum adanya peraturan daerah tentang penanaman modal dan peraturan bupati terkait pelayanan perizinan berusaha yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 dan Nomor 06 Tahun 2021	Tumpang tindihnya regulasi sektoral yang berlaku dan minimnya koordinasi antar lembaga sektoral karena adanya ego sektoral
	Belum adanya regulasi yang mengatur secara teknis tentang pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha	
	SIMBG belum dapat diimplementasikan	
	Sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang OSS baik secara langsung/tatap muka maupun melalui medsos sangat minim	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami tentang OSS
	SDM yang kurang memahami regulasi maupun IT	Pelayanan terhadap pelaku usaha yang sering dirasa tidak sesuai keinginan mereka

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh instansi sendiri maupun dari luar kepada SDM DPMPSP yang terbatas	
	Keengganan perusahaan untuk dikunjungi dalam rangka kegiatan pemantauan, pengawasan maupun verifikasi	Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan
	Penyajian data realisasi investasi sering terlambat karena meskipun sudah dirilis oleh BKPM tetapi belum masuk pada aplikasi NSWI (<i>National Single Window for Investment</i>)	Ketidaksinkronan data
	Keterbatasan SDM. SDM selain sebagai front office juga sebagai backoffice. Sehingga data yang diminta tidak dapat terpenuhi cepat.	
	Kepedulian pelaku usaha untuk melaporkan nilai realisasi investasi melalui LKPM sangat minim	

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana, dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif maka dengan bertitik tolak dari fakta sejarah serta kondisi faktual maka berdasarkan masa bhakti 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

**“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera,
Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagai berikut:

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2	Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa

	keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3	Gresik yang Berdaya Saing Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan

			pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4	Gresik Berkemajuan	yang	Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.
5	Gresik Berlandaskan Akhlakul Karimah	yang	Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki

akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan yaitu :

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota;

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan social dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik masuk pada **Misi ke-3** Kabupaten Gresik yaitu '**Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah**' dengan **Tujuan ke-3** yaitu '**Menguatkan Pembangunan Perekonomian Gresik yang inklusif**' dan indikator kinerjanya yaitu : Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu sasaran ke- 6 yaitu : '**Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sekolah dan Antar Wilayah**' dengan indikator kinerja yaitu Indeks Williamson yang merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja OPD.

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang merinci struktur kelembagaan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP termasuk perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP nantinya akan berdiri sendiri, tidak ada campur tangan kepala daerah dalam tanda tangan untuk pengeluaran izin, semua akan berbasis elektronik. Sehingga dapat memutus rantai birokrasi yang panjang. Hal ini selain dapat mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik juga merupakan tantangan bagi daerah untuk dapat mempersiapkan baik dari segi sarana prasarana maupun

SDM dalam mendukung terlaksananya peraturan pemerintah tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mencabut aturan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Salah satu perubahan pengaturan dalam PP ini yaitu perizinan usaha menjadi berbasis risiko. Dalam perjalanannya OSS mengalami transisi, dimulai OSS versi 1.0 pada tahun 2018, OSS versi 1.1 pada tahun 2019 (surat Edaran BKPM Nomor : 5743/A.8/B.1/2019 tahun 2019 tentang Rencana Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1) dan OSS RBA yang secara resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Walaupun telah beberapa kali mengalami transisi, penggunaan OSS masih belum maksimal karena terkendala sistem dari pusat. Selain itu OSS RBA juga belum terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang baik bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maupun bagi para investor/pemohon izin dalam memanfaatkan hadirnya OSS ini.

Tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP diantaranya untuk dapat melaksanakan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 ini secara maksimal mungkin sehingga OSS ini dapat berjalan dan dapat dipahami oleh investor/pemohon yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik.

Peluang bagi investor/pemohon izin dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 ini adalah kemudahan dalam memperoleh izin. Karena dengan mengakses OSS ini investor/pemohon izin sudah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan Akses Kepabeanan.

3. Lokasi Kabupaten Gresik yang sebagai *hinterland* Kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di kawasan Indonesia Timur dan sekaligus pintu yang menghubungkan dunia luar baik regional maupun internasional dengan dukungan pelabuhan dan bandara internasional. Hal ini dapat membuat para investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.
4. Dijadikannya JIPE (*Java Integrated Industrial and Port Estate*) sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui PP Nomor 71 Tahun 2021. Hal ini dapat mendorong para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik, karena adanya KEK dapat memberikan fasilitas akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026. Untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengemban Nawa Karsa ke5 yaitu **Gema Karya** dengan output kunci '**Koridor Investasi Gresik (KIG)**'.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdapat 8 program dan 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 12.328.876.599,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12.328.876.599	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12.328.876.599	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				12.328.876.599	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				12.328.876.599	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	90%	10.410.049.621	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	90%	10.410.049.621	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	58.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	58.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	34.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	34.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	24.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	24.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	7.846.887.667	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	7.846.887.667	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/ bulan	7.829.000.901	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/ bulan	7.829.000.901	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	17.886.766	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	17.886.766	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	98.309.256	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	98.309.256	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	98.309.256	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	98.309.256	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	391.418.951	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	391.418.951	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	18.185.205	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	18.185.205	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	71.617.043	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	71.617.043	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	53.869.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	53.869.050	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.587.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.587.450	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	3.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	3.240.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	100.269.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	100.269.000	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	101.651.203	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	101.651.203	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.706.643.599	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.706.643.599	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.960.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.960.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	448.202.599	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	448.202.599	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.256.481.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.256.481.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	308.790.148	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	308.790.148	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.610.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.610.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	61.946.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	61.946.000	
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.268.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.268.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	21.787.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	21.787.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	1.76.529.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	1.76.529.900	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	7.648.748	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	7.648.748	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	219.696.467	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	219.696.467	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	60.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	60.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	10.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	10.000.000	
23	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	50.000.000	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	50.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	159.696.467	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	159.696.467	
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.027.600	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.027.600	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	12.207.589	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	12.207.589	
26	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	122.461.278	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	122.461.278	
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	3,93%	412.804.781	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	3,93%	412.804.781	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	412.804.781	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	412.804.781	
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 dokumen	409.804.781	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 dokumen	409.804.781	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	3.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	3.000.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	797.172.112	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	797.172.112	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	797.172.112	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5083 pelayanan	797.172.112	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 dokumen	100.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	375.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	375.000.000	
31	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha	274.123.112	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha	274.123.112	
32	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 kegiatan usaha	48.049.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 kegiatan usaha	48.049.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	475.238.668	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	475.238.668	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	475.238.668	
33	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 kegiatan usaha	61.777.200	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 kegiatan usaha	61.777.200	
34	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	253.176.808	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	253.176.808	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	160.284.660	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	160.284.660	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	13.914.950	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	13.914.950	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	13.914.950	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	13.914.950	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	13.914.950	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	13.914.950	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel **T-C.32** sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				-
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				-
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dinas Penanaman	Jumlah orang yang menerima	51	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASN	Modal dan PTSP	gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	-
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	-
12	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	-
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	13 unit	-
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	-
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	-
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	-
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	39,04%	-
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	-
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	-
23	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	-
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
25	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	-
26	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	-
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	14%	-
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	-
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 dokumen	-
28	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	-
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 dokumrn	-
30	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	-
31	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha	-
32	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	25 pelaku usaha	-
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	-
33	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 kegiatan usaha	-
34	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	-
35	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusah	125 kegiatan usaha	-
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	-
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota					
36	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.	Kewenangan pemrosesan izin sebagian masih berada pada instansi – instansi teknis
2	Kewenangan penerbitan izin investasi diatas >10 milyar	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008	Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
3	Pelaksanaan OSS (One Single submission)	1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 2. Peraturan Pemerintah	Penerapan OSS belum resmi diterapkan di daerah namun SPIPSE sebagai sistem

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
		Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelayanan perizinan investasi sebagai sistem yang diterapkan sebelumnya, telah dihentikan
4	Regulasi dan kebijakan yang <i>out of date</i>	1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015-2019 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota	Regulasi yang menjadi acuan dalam dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan di daerah perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sesuai Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung misi ketiga Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah”**. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan tujuan dari misi ketiga RPJMD 2021-2026 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada di dalamnya yaitu “Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif”. Sementara sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021-2026 yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Gresik adalah sasaran ke-enam, yaitu “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor Antar Wilayah”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan DPMPTSP Kabupaten Gresik yang akan dicapai adalah sebagai berikut : **“Menciptakan iklim investasi yang kondusif”**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dua sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya angka investasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan realisasi investasi
2. Nilai survey kepuasan masyarakat

Untuk memperoleh gambaran hubungan antara keduanya, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dilihat di Tabel 4.1

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
			Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	2.98%	2.89%	5,00%	8,50%	12,00%	15,00%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (91,095)	SANGAT BAIK (88,31)	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (88,58)	SANGAT BAIK (88,61)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : *Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah*

Misi ke 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- Kewenangan penerbitan izin investasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 terdapat 6 program dan 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 12.328.876.599,-

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta ringkasan prioritas permasalahan penanaman modal dan perizinan tahun 2025 dan program/kegiatan utama untuk menyelesaikannya.

Table 2.7 (T-C.33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12.328.876.599				12.328.876.599
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				12.328.876.599				12.328.876.599
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan		90%	10.410.049.621			90%	10.410.049.621
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		3 jenis dokumen	58.000.000			3 jenis dokumen	58.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	34.000.000	APBD	-	1 dokumen	34.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 laporan	24.000.000	APBD	-	2 laporan	24.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		2 dokumen	7.846.887.667			2 dokumen	7.846.887.667
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	52 orang/ bulan	7.829.000.901	APBD	-	52 orang/ bulan	7.829.000.901

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	17.886.766	APBD	-	12 laporan	17.886.766
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 paket	98.309.256			1 paket	98.309.256
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83 orang	98.309.256	APBD	-	83 orang	98.309.256
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		6 sub kegiatan	391.418.951			6 sub kegiatan	391.418.951
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	18.185.205	APBD	-	1 paket	18.185.205
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10 paket	71.617.043	APBD	-	10 paket	71.617.043
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 paket	53.869.050	APBD	-	3 paket	53.869.050
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 paket	42.587.450	APBD	-	2 paket	42.587.450
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 dokumen	3.240.000	APBD	-	5 dokumen	3.240.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	65 laporan	100.269.000	APBD	-	65 laporan	100.269.000
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	101.651.203	APBD		1 dokumen	101.651.203
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jasa	1.706.643.599			3 jasa	1.706.643.599

13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	1.960.000	APBD	-	12 laporan	1.960.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	448.202.599	APBD	-	12 laporan	448.202.599
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	1.256.481.000	APBD	-	12 laporan	1.256.481.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		6 jenis	308.790.148			6 jenis	308.790.148
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 unit	38.610.000	APBD	-	1 unit	38.610.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13 unit	61.946.000	APBD	-	13 unit	61.946.000
18	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 unit	2.268.000	APBD	-	5 unit	2.268.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 unit	21.787.500	APBD	-	6 unit	21.787.500
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13 unit	176.529.900	APBD	-	13 unit	176.529.900
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 unit	7.648.748	APBD	-	3 unit	7.648.748
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		31,23%	219.696.467			31,23%	219.696.467
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian		2 draft	60.000.000			2 draft	60.000.000

	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	fasilitas							
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	10.000.000	APBD	-	1 dokumen	10.000.000
23	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 dokumen	50.000.000	APBD	-	2 dokumen	50.000.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft/ kajian	159.696.467			2 draft/ kajian	159.696.467
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	25.027.600	APBD	-	1 dokumen	25.027.600
25	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 daerah	12.207.589	APBD	-	1 daerah	12.207.589
26	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	122.461.278			1 dokumen	122.461.278
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal		3,93%	412.804.781			3,93%	412.804.781
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 jenis	412.804.781	APBD	-	2 jenis	412.804.781
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4 dokumen	409.804.781	APBD	-	4 dokumen	409.804.781
28	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	3.000.000			1 dokumen	3.000.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin		75%	797.172.112			75%	797.172.112
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu	Jumlah pelayanan		5585 pelayanan	797.172.112		-	5585 pelayanan	797.172.112

	Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	40 dokumen	100.000.000	APBD	-	40 dokumen	100.000.000
30	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1000 pelaku usaha	375.000.000	APBD	-	1000 pelaku usaha	375.000.000
31	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25 pelaku usaha	274.123.112	APBD	-	25 pelaku usaha	274.123.112
32	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25 kegiatan usaha	48.049.000	APBD		25 kegiatan usaha	48.049.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan		30%	475.238.668			30%	475.238.668
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		152 kali	475.238.668		-	152 kali	475.238.668
33	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25 kegiatan usaha	61.777.200	APBD dan DAK	-	25 kegiatan usaha	61.777.200
34	Bimbingan Teknis kepada	Jumlah Pelaku Usaha yang	Dinas	450 pelaku	253.176.808	APBD	-	450 pelaku	253.176.808

	Pelaku Usaha	Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penanaman Modal dan PTSP	usaha		dan DAK		usaha	
35	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	125 kegiatan usaha	160.284.660	APBD dan DAK		125 kegiatan usaha	160.284.660
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal		90%	13.914.950			90%	13.914.950
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi		3 jenis dokumen	13.914.950		-	3 jenis dokumen	13.914.950
36	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	13.914.950	APBD		1 dokumen	13.914.950

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Table 2.8

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				16.103.311.743	16.912.377.837
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	12.734.732.743	13.346.323.837
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	173.354.000	198.664.950
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	40.004.769	56.761.429
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	133.349.231	141.903.521
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	8.017.779.743	8.218.920.557
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/bulan	8.000.000.000	8.200.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	17.779.743	18.920.557
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	80.099.000	89.872.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	80.099.000	89.872.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	765.263.000	854.672.330
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	16.890.975	18.920.532
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	244.474.644	246.887.452
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	204.469.702	264.887.452
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	84.454.877	94.602.662
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	7.111.990	8.514.240
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	128.904.812	141.903.992
	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	78.956.000	78.956.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.302.384.000	1.424.244.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4.444.997	5.203.150

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	373.379.713	425.712.255
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	924.559.290	993.328.595
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	2.395.853.000	2.559.950.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.115.967	42.571.231
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	13 unit	128.904.892	141.904.102
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	19.557.984	23.650.684
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	186.689.844	199.611.770
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	1.777.998.516	1.892.054.693
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	243.585.797	260.157.520
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	39,04%	1.000.000.000	1.150.000.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	1 draft	250.000.000	300.000.000
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	0	0

	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	250.000.000	300.000.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	750.000.000	850.000.000
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	200.000.000	250.000.000
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	0	0
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	550.000.000	600.000.000
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	14%	600.000.000	600.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	600.000.000	600.000.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	600.000.000	700.000.000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	0	0
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	1.229.996.000	1.229.996.000
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	1.229.996.000	1.229.996.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 dokumen	100.000.000	100.000.000

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	459.996.000	459.996.000
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha	600.000.000	600.000.000
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 pelaku usaha	70.000.000	70.000.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	500.000.000	545.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	500.000.000	545.000.000
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 kegiatan usaha	50.000.000	60.000.000

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	300.000.000	310.000.000
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	150.000.000	175.000.000
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	38.583.000	41.058.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	38.583.000	41.058.000
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	38.583.000	41.058.000

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik, 23 AUG 2024
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

A.M. REZA PAHLEVI, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1001

**MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

349563284

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12,328,876,588	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				12,328,876,588	
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan		90%	10,410,049,621	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		3 jenis dokumen	58,000,000	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM PTSP	1 dokumen	34,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM PTSP	2 laporan	24,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		2 dokumen	7,846,887,667	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPM PTSP	52 orang/ bulan	7,829,000,901	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	DPM PTSP	12 laporan	17,886,766	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 paket	98,309,256	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPM PTSP	83 orang	98,309,256	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		6 sub kegiatan	391,418,951	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPM PTSP	1 paket	18,185,205	Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPM PTSP	10 paket	71,617,043	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DPM PTSP	3 paket	53,869,050	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPM PTSP	2 paket	42,587,450	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DPM PTSP	5 dokumen	3,240,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	65 laporan	100,269,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	DPM PTSP	1 dokumen	101,651,203	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jasa	1,706,643,599	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	12 laporan	1,960,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPM PTSP	12 laporan	448,202,599	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPM PTSP	12 laporan	1,256,481,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		6 jenis	308,790,148	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPM PTSP	1 unit	38,610,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DPM PTSP	13 unit	61,946,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	DPM PTSP	5 unit	2,268,000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DPM PTSP	6 unit	21,787,500	Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	DPM PTSP	13 jenis	176,529,900	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DPM PTSP	5 jenis	7,648,748	Dana Alokasi Umum
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		10.00%	219,696,456	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft	60,000,000	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	1 dokumen	10,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DPM PTSP	2 dokumen	50,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun		2 draft/kajian	159,696,456	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPM PTSP	1 dokumen	25,027,589	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	DPM PTSP	1 daerah	12,207,589	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten /kota	DPM PTSP	1 kajian	122,461,278	Dana Alokasi Umum
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal		10%	412,804,781	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal		2 jenis	412,804,781	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	DPM PTSP	4 dokumen	409,804,781	Dana Alokasi Umum
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	DPM PTSP	1 dokumen	3,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin		75%	797,172,112	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan		5585 pelayanan	797,172,112	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPM PTSP	40 dokumen	100,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	1000 pelaku usaha	375,000,000	Dana Alokasi Umum
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	25 pelaku usaha	274,123,112	Dana Alokasi Umum
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha	DPM PTSP	25 pelaku usaha	48,049,000	Dana Alokasi Umum
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan		30%	475,238,668	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		152 kali	475,238,668	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPM PTSP	25 kegiatan usaha	61,777,200	Dana Alokasi Umum
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPM PTSP	450 pelaku usaha	253,176,808	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPM PTSP	125 kegiatan usaha	160,284,660	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal		4	13,914,950	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi		3 jenis	13,914,950	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	DPM PTSP	1 dokumen	13,914,950	Dana Alokasi Umum



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/1371/HK/437.12/2024
TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/1371 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026; b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2026;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja di bidang Penanaman Modal I a. Ketua b. Anggota	 SANTI WAHYU LESTARI, S.PI., M.AP., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) HADI ISWANTO, S.T., M.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	 a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Penanaman Modal; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Penanaman Modal; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Penanaman Modal;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) ACHMAD WELLI SANTOSO, S.Sos., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 3) KARTIKO PUNGKI FAUSA, S.Pi.,M.Ec.Dev., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan di bidang Penanaman Modal.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja di bidang Penanaman Modal II a. Ketua	MEI RISNAWATI, S.T., M.M., Penata Perizinan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Penanaman Modal; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Penanaman Modal;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) SAIDAH ROCHMAH, Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) WULAN YULISTYA L., S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 3) MUJIONO, S.S., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Penanaman Modal; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan di bidang Penanaman Modal.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I a. Ketua	FAUZI BUDI SETIAWAN, S.T., M.,T., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota:	1) MOHAMMAD FAKHRUL ROZY, S.Kom., M.M., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 2) YUFI ISLAMIYAH, S.E., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II a. Ketua	AGUSTYA HENNY S., S.S., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) RESTU BUDIYONO, S.PT., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 2) MAS RIJAL MAHFUDLI, S.T., M.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	1) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral;

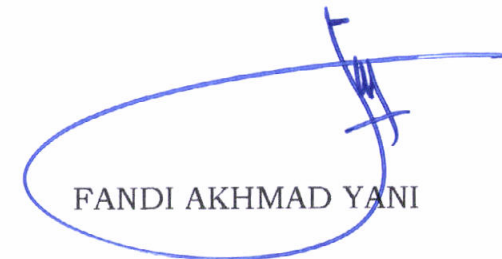


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota:	Analisis dan Pengolahan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; 4) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

